

TARGETKAN SATU DESA SATU MUSEUM

Di NTB, Baru Ada 5 Museum

MATARAM (KR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan keberadaan museum dapat menyaorai ke level paling bawah, yakni ke pedesaan. Pasalnya saat ini di NTB baru ada lima museum.

Kelima museum tersebut adalah Museum Negeri NTB di Pulau Lombok. Empat museum lainnya ada di Pulau Sumbawa. Museum Bala Daturana Kabupaten Sumbawa, Musiem Asi Mbojo Kabupaten Bima, Museum Samparaja yang dimiliki Kasultanan Kerajaan Bima dan Museum Daerah di Kabupaten Sumbawa.

Padahal di NTB ada 10 kabupaten/kota dengan dua pulau yang terpisah. "Kami mendorong agar kabupaten/kota yang lain juga segera memiliki museum," kata Kepala Museum Negeri NTB Nur Alam ketika menerima rombongan Komisi A DPRD DIY beserta



KR-Atek Widayastu H

Penyerahan cenderamata antara DPRD DIY dengan pengelola Museum Negeri NTB.

wartawan unit DPRD DIY di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Senin (3/6).

Pemprop NTB juga telah mengumpulkan seluruh kepala daerah di kabupaten/kota mengenai wacana tersebut. Diharapkan tiap-tiap desa terdapat satu museum. Pentingnya keberadaan museum, menurut Nur Alam, karena di NTB ini terbentuk dari persilangan dua budaya. Pulau Lombok dengan Kerajaan

Majapahitnya, dan di Pulau Sumbawa persilangan dari Kerajaan Gowa Sulawesi.

"Ada dua artefak dari dua keberadaan tersebut. Bahkan sejumlah benda peninggalan juga ada. Dengan ada museum, pasti akan menjadi nilai sejarah tersendiri," ungkapnya.

Pemprov NTB juga memiliki program pengembangan museum dengan nama 'Kotaku Museumku, Kampungku Museumku'. Ini juga akan di-

jadikan data tarik wisatawan berbasis budaya. Setelah sebelumnya melalui slogan wisata halal dan sport tourism.

Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu mempertanyakan tentang anggaran mengenai wacana satu desa satu museum tersebut. Mengingat menjaga museum itu tidak mudah. "Museum itu tidak sekedar mengumpulkan benda bersejarah saja. Namun harus dirawat barang-barangnya. Dan ini pasti membutuhkan biaya. Termasuk petugas yang menjaganya," ujarnya.

Dijelaskan Nur Alam, keberadaan museum di desa bukan berarti meminta semua benda-benda bersejarah dari masyarakat. Atau memindahkan tangkapan. Melainkan sebagai bentuk inventaris. "Kepelembutannya tidak berpindah. Nantinya kami hanya meregister saja," jelas Nur Alam.

(Awh)-d

LAYANI JEMAAH HAJI LANSIA

BSI Siapkan 200 Kursi Roda

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengoptimalkan layanan bagi jemaah haji yang berusia lanjut usia (lansia) melalui penyediaan 200 kursi roda selama ibadah haji di Tanah Suci. BSI bekerja sama dengan Kementerian Agama RI bersinergi memberikan layanan kursi roda bagi lansia di titik Masjidil Haram dan Terminal Syib Amir dan Jiyad.

"Nantinya, jemaah lansia Indonesia dapat mengajukan kepada Ketua Kloter kemudian diteruskan ke Ketua Sektor, dengan syarat jemaah tersebut merupakan jemaah kategori lansia atau sakit yang sangat tergantung kursi roda serta tidak membawa kursi roda dari Tanah Air," kata Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna di Jakarta, Senin (3/6).



KR-Istimewa

BSI menyediakan 200 kursi roda untuk jemaah haji lansia.

Berdasarkan data internal BSI, sebanyak 53 persen calon jemaah haji di BSI sebagian besar berusia di atas 55 tahun. Untuk memudahkan para jemaah, BSI telah menyiapkan layanan pra dan pasca-haji yang bisa digunakan calon jemaah haji BSI, terutama lansia.

Anton Sukarna mengata-

kan, jemaah haji Indonesia yang berusia lansia harus difasilitasi dengan baik, apalagi mereka adalah tamu istimewa yang telah menunggu lama untuk bisa beribadah haji di tahun ini. Hal inilah yang menjadi spirit BSI untuk terus menjadi sahabat finansial, sosial dan spiritual bagi masyarakat.

(Ogi)-d

Indonesia

harus ada pihak-pihak yang meningkatkan bantuan, salah satunya Indonesia.

"Pelemahan terhadap UNRWA ini sistematis, karena Israel tidak mau para pengungsi Palestina itu kembali ke tanah airnya dan syarat sebuah negara itu harus ada tanah dan rakyatnya. Maka Indonesia terus membantu Palestina dengan melawan isu-isu yang menghambat realisasi berdirinya negara Palestina," tandas Menlu.

Kemudian soal upaya memasukkan Palestina dalam keanggotaan PBB, menurut Retno, di Majelis Umum PBB, saat ini dukungan negara-negara lain terhadap keanggotaan Palestina sangat banyak. Namun, sistem di PBB, pengesahan sebuah negara untuk masuk menjadi anggota PBB, bukan di Majelis Umum tapi di Dewan Keamanan PBB.

"Oleh karena itu, mari (negara-negara pendukung Palestina) kita gunakan semua pengaruh kita agar tidak ada veto lagi yang terkait dengan keanggotaan penuh negara Palestina di PBB. Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang berada di garis depan untuk

mengupayakan itu," tuturnya.

Sementara itu, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Menakar Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia' terungkap, konflik berkepanjangan di Timur Tengah tak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat di wilayah tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang luas bagi negara-negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, harus segera dilakukan untuk mencegah potensi risiko buruk terhadap perekonomian global.

Pengamat Konflik Timur Tengah dan Diplomasi Indonesia yang juga akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Masyrofa mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam secara ekonomi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah. Sebab, Indonesia merupakan pengimpor minyak yang bersumber dari negara-negara di Timur Tengah.

Menurutnya, konflik berkepanjangan hanya akan mengganggu berbagai sek-

tor perekonomian. Misalnya, mengganggu rantai pasokan barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan harga produk dan inflasi.

Oleh sebab itu, Masyrofa menilai, pengakuan dari tiga negara Eropa, yakni Norwegia, Irlandia dan Spanyol serta pemberian hak penuh PBB terhadap Palestina harus dijadikan momentum untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Masyrofa melihat, penyelesaian konflik menjadi krusial karena bukan hanya meringankan penderitaan masyarakat Palestina, tetapi juga untuk mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas. Ia mengimbau, Indonesia dapat memainkan peran penting dengan menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk mendorong dialog dan perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik.

Salah satunya diplomasi Indonesia yang konsisten mendorong Solusi Dua Negara atau Two State Solutions antara Israel dan Palestina menjadi jalan keluar terbaik untuk mencegah konflik yang berlarut-larut.

(Dev/Ati)-d

Sambungan hal 1

Pintu

Menjelang mendekati puncak haji, penjagaan di pintu masuk Kota Makkah diperketat. Bahkan, razia jemaah haji ilegal, tanpa visa haji terus digencarkan.

Sementara di hari ke-23 kedatangan jemaah Indonesia, sudah mencapai 162 ribu lebih. Berdasarkan Laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Senin (3/6) Pukul 01.00 WIB, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 162.961 orang yang terbagi dalam 415 kloter.

Anggota Media Center Kemenag Widi Dwinanda menyampaikan, dirangkum dari Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT), tanggal 3 Juni 2024 pukul 06.42 WIB, jemaah gelombang kedua yang telah tiba di Tanah Suci berjumlah 73.488 orang, dengan jumlah jemaah laki-laki 32.359 orang (44.03%) dan je-

maah perempuan 41.129 orang (55.97%). Operasional keberangkatan jemaah gelombang kedua berakhir pada 10 Juni 2024 mendatang. "Tercatat ada 32 jemaah yang wafat pada hari ke-22 operasional penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pada hari operasional yang sama di 2023, tercatat 62 jemaah wafat," jelas Widi dalam keterangan resminya, kemarin.

Tahun ini, kata Widi, pemerintah menetapkan kebijakan *istitha'ah* (kemampuan kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya haji. Permenkes No 15 tahun 2016 menjelaskan, *istitha'ah* adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji secara fisik, mental dan perbekalan. Sedangkan, *istitha'ah* kesehatan yakni kemampuan kesehatan jemaah haji secara kesehatan fisik dan mental dengan pemeriksaan kesehatan yang terukur.

Saat ini, seluruh jemaah gelombang pertama telah berada di Kota Makkah Al-Mukarramah. Pelepasan jemaah haji kloter BPN 07 dari kota Madinah ke Makkah setelah mengambil miqat di Bir Ali menandai berakhirnya pelaksanaan operasional layanan jemaah haji gelombang pertama dari Madinah.

PPIH, kata Widi, terus mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri sebaik mungkin menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina. Fase tersebut membutuhkan kesiapan utama yaitu kesehatan fisik. "Selain mendalami lagi manasik haji secara mandiri dan mengikuti giat bimbingan ibadah di musala hotel, jemaah dapat menjalankan aktivitas olahraga ringan dan mengikuti arahan petugas kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat," tambahnya.

(Jon)-d

Sambungan hal 1

Tata Kelola

(2) Proses aktivitas bisnis yang penting, meliputi rekrutmen, pembiayaan, serta pengembangan bisnis. (3) Pengelolaan konflik kepentingan dan sistem informasi organisasi. (4) Relasi antara investor dan pemegang saham.

(5) Sumber daya yang tepat untuk mendukung manajemen risiko SDM, hukum, kepatuhan, teknologi, dan keuangan. (6) Aksi korporasi yang melibatkan modal saham. (7) Kinerja direksi sebagai pihak utama yang menjaga budaya serta keberlanjutan startup.

Implementasi strategi tata kelola dan risiko yang tepat pada startup akan

menghasilkan beberapa manfaat berikut ini: (1) Meningkatkan kepercayaan investor. (2) Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pengambilan keputusan. (3) Mengurangi risiko hukum dan peraturan. (4) Meningkatkan tata kelola operasional.

Setiap startup membutuhkan kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda-beda, tergantung dari bidang bisnis, budaya, serta tujuan yang ingin dicapai. Strategi pengembangan startup yang tepat akan membuat perusahaan rintisan tersebut meraih kesempatan berkembang se-

cara maksimal di masa depan.

Pemahaman tata kelola dan manajemen risiko bagi startup menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk asosiasi profesi, pengusaha dan Perguruan Tinggi.

Momentum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) seharusnya dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk membantu startup dalam menerapkan tata kelola dan manajemen risiko.

(Penulis Dosen Program Studi Manajemen FEB-UAD & Wakil Sekretaris ISEI-Cabang DIY)-d

Tiga

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Gradasi Zainul Arifin mengatakan, mereka menuntut agar KY memanggil ketiga hakim MA itu untuk diperiksa. "Kami berharap KY terbuka ke publik untuk memroses pengadilan masyarakat sebagaimana kewenangan yang dimiliki KY," tandasnya.

Dihubungi terpisah, anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata membenarkan bahwa KY telah menerima laporan

Sambungan hal 1

Gradasi. Laporan tersebut akan diproses sesuai prosedur dengan kewenangan KY untuk memeriksa pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, KY akan memeriksa hakim terlapor yang nantinya diputuskan dalam sidang pleno apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik," tegasnya.

(Ant/Has)-d

Febri

tahap penyidikan. "Jadi untuk proses penyidikan nilai totalnya adalah Rp 3,1 miliar untuk tiga klien," kata Febri menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

Menurut Febri, honorarium itu berasal dari dana pribadi ketiga kliennya, bukan dari Kementerian Pertanian maupun hasil tindak pidana. "Pak SYL juga menyatakan secara tegas bahwa dana itu bersumber dari pribadi. Bahkan saat itu, yang saya dengar, Pak Syahrul mengatakan ke salah satu orang yang hadir," ungkap-

Sambungan hal 1

nya. Sementara itu, SYL meminta proses perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dirinya tidak ditunda, sehingga bisa dipercepat untuk disidangkan di meja hijau. "Dengan umur saya yang 70 tahun, saya bermohon, kalau mungkin, ada proses TPPU bisa dilanjutkan atau jangan ditunda," katanya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/6).

(Ant/Has)-d

Kepala

"Namanya mundur di surat tidak disebutkan, tentu saja kami tidak tahu juga," kata Pratikno.

Anggota DPR RI Daniel Johan mengemukakan mundurnya Bambang Susantono dari jabatan OIKN perlu jadi momen bagi seluruh pihak untuk duduk bersama mengevaluasi target-target pembangunan IKN. Sebagai wakil masyarakat, menurut Daniel, banyak orang yang menilai target-target pembangunan IKN tersebut cukup tinggi, sehingga Kepala OIKN cukup berat menanggung beban tersebut.

"Kadang-kadang di luar bayangan kita, seperti mengejar target-target untuk sampai

Sambungan hal 1

17-an (upacara 17 Agustus 2024). Target-target pembangunan infrastruktur," kata Daniel.

Walaupun banyak yang belum yakin, ia mengatakan kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan RI bisa saja tetap digelar pada 17 Agustus 2024 di IKN, karena upacara itu diadakan hanya sebatas berkumpul. Namun, hal yang perlu dibahas adalah terkait kesiapan pemindahan ibukota dan kesiapan IKN untuk menjadi ibukota yang baru bagi RI. "Ini menjadi catatan penting sekaligus bagi semua yang terlibat benar-benar menilai kembali target-target yang relevan dan sesuai kemampuan itu seperti apa," ucapnya.

(Ant/Obi)-d

2.004 RS

berbeda, dimana di Indonesia Timur satu ruangan berisi 12 kasur dan kamar mandinya jauh, sementara di Jakarta ruangnya sudah dilengkapi kamar mandi dalam meski Kelas 3.

"Nah, ini yang variasi-variasi itulah yang akan kita standardkan sehingga pasien merasa nyaman dengan kepesertaan tadi mereka menerima pelayanan yang sama," katanya.

Adapun kriteria-kriteria tersebut, ujarnya, yaitu komponen bangunan yang tidak memiliki porositas atau tidak berpori-pori, karena hal tersebut dapat menjadi sumber infeksi. Menurutnya, standar untuk bangunan adalah yang paling utama.

"Kemudian juga masalah ventilasi. Nah ventilasi udara. Jadi kita berharap kamar pasti enak, nyaman. Sirkulasi udara



Prakiraan Cuaca Selasa, 4 Juni 2024					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				22-30	65-95
Sleman				22-29	65-95
Wates				22-29	65-95
Wonosari				22-30	65-95
Yogyakarta				22-30	65-95

Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Sampah Melalui Pelatihan Komunikasi dan Pembuatan Lilin Aromaterapi dari Minyak Jelantah



Dwi Pela Agustina, SIKom MA
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

SAMPAH selalu menjadi problematika dalam kehidupan manusia baik di kota maupun di desa. Produk hasil dari kegiatan manusia ini akan menjadi ancaman serius jika tidak ditangani dengan baik

dan benar. Tidak hanya pencemaran visual maupun udara, hasil produksi yang sudah menjadi sampah juga dapat mencemari lingkungan, khususnya tanah dan air. Salah satu hasil pengolahan makanan yang dihasilkan rumah tangga yaitu hasil minyak bekas sisa penggorengan, atau dikenal dengan minyak jelantah.

Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang digunakan secara berulang-ulang untuk menggoreng makanan dengan menggunakan minyak goreng yang sama. Penggunaan minyak jelantah tersebut menimbulkan bahaya bagi tubuh kita dan pembuangan minyak jelantah secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun perairan. Hal ini menandakan minyak bekas pakai telah berada pada

kadar yang menimbulkan lemak jenuh dan menghasilkan zat-zat yang tidak menyehatkan bagi tubuh manusia. Jelantah merupakan minyak dari sisa hasil penggorengan yang digunakan berulang kali. Biasanya, minyak jelantah dibuang karena sudah tidak memiliki nilai guna. Pembuangannya akan menjadi limbah yang tidak baik untuk lingkungan. Terlebih bila limbah tersebut dibuang di sungai, dan juga bila dibuang di kantong plastik akan mengakibatkan sulit terurai.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis bersama tim pengabdian masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta menggelar kegiatan penyuluhan guna memberikan edukasi dan pemahaman bagi warga dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah limbah minyak

jelantah. Kegiatan ini merupakan praktik dari komunikasi penyuluhan dengan media tatap muka di Padukuhan Jongkangan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 25 Mei 2024 lalu bertempat di Pendopo Jongkangan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KSM) Ngudi Rejeki yang memiliki program Bank Sampah (menabung) dan Sedekah Sampah.

Selama ini minyak jelantah hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul, namun pada kesempatan ini, Tim Pengabdian Masyarakat dan KSM Ngudi Rejeki mencoba memberikan pemahaman kepada warga bahwa limbah Minyak Jelantah dapat disulap menjadi produk yang bernilai jual yaitu lilin aromaterapi.

Selain bekerjasama de-

ngan KSM Ngudi Rejeki, kegiatan ini juga merupakan kolaborasi dengan kampus Universitas Islam Riau sebagai Implementasi Kerjasama dalam bidang pengabdian dosen. Karenanya, Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ri. Imam Riau, M.I.Kom menjadi pemateri yang memaparkan tentang pentingnya komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah bagi pengurus dan masyarakat Jongkangan. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman komunikasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap pengelolaan sampah.

Sampah yang memiliki nilai jual ekonomis harus dimanfaatkan agar mengurangi sampah dan dapat menciptakan peluang penghasilan baru bagi masyarakat Padukuhan Jongkangan.

Deppi Susilandari, selaku ketua KSM Ngudi Rejeki dan pemateri dalam pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah juga menyampaikan dan menghibur masyarakat untuk dapat memilah sampah dan memanfaatkan bank sampah dan sedekah sampah agar meminimalisir sampah yang masuk ke TPA. Termasuk sampah minyak jelantah yang tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat merusak lingkungan. Tidak hanya menjadi lilin aromaterapi, namun minyak jelantah juga dapat diolah menjadi sabun. Namun karena keterbatasan alat dan bersesko karena menggunakan soda api, maka yang paling aman dilakukan adalah membuat lilin aromaterapi.

Dengan demikian, sesuai dengan tujuan kegiatan ini, tim berharap benar-benar dapat



memberikan edukasi dan pengalaman dalam mengelola sampah dengan bijak. Khususnya minyak jelantah, jika memang tak terhindarkan penggunaannya, maka harapannya dapat diolah Kembali. Berdasarkan hasil evaluasi kepada peserta, kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan dan pelatihan telah memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi warga peserta kegiatan yang dapat diimplementasikan atau dibagikan kepada warga lainnya. Sehingga hal yang tadinya disebut sampah dapat menjadi produk yang bermanfaat. ***